

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR



**OLEH
AQISYIAH RIFDAENI AMALIA
B 121 13 507**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH
AQISYIAH RIFDAENI AMALIA
B 121 13 507**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh
AQISYIAH RIFDAENI AMALIA
B 121 13 507

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 16 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002

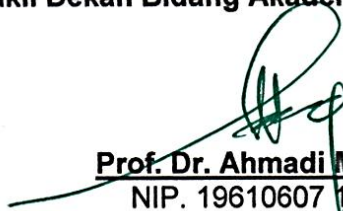
Sekretaris



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Angkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AQISYIAH RIFDAENI A
Nomor Pokok : B12113507
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : AQISYIAH RIFDAENI AMALIA
NIM : B 121 13 507
PRODI : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Seminar Skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing II



Dr. Romi Librayanto S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya karena berkat izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, **Ibunda Siti Ratna Djamaluddin** dan **Ayahanda Achmad Salman**, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis serta menjadi teman diskusi yang baik untuk penulis sebagai putri sulungnya. Penulis juga berterima kasih kepada Adik Kandung Penulis **Eka Pratiwi Ningsih** dan **Putri Marissa Achmad**, karena telah memberikan penulis semangat dan hiburan serta motivasi selama ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak **Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.Si**, Bapak **Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H**, selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;

7. Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan selama penelitian penulis;
8. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ASAS 2013, Keluarga Besar Formahan, dan Keluarga Besar HLSC;
9. Teman-teman HAN 2013 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, terima kasih karena sudah merangkai berbagai macam kisah dan cerita selama berkuliah di FH-UH.
10. Untuk Adik-adik kecil penulis Zibriana Zibran, Fitrah Nur hidayah, Putra Rama Wardhana, Azzahrah Diah Wardhani, Aldiya Radja Tubagus, Miftah Damiri, Alm. Laksamana yang selalu membuat penulis semangat dan tidak mudah menyerah.
11. Untuk Bonda, Rahma Dg. Tonji yang mulai dari kecil ikut mengurus penulis sampai dengan saat ini, membantu dengan tulus segala keperluan perkuliahan penulis.
12. Geng Battle dan Kumpul Tedong, Syamsud Duha, Indra S.E., Bayu Supriyadi S.H, Vian Cakra S.H, Arya Batara, Andika Adhiyaksa S.H, Nur Fatwah Bahar S.H, Harfira Rizky S.H, Nurfalila Qurnaeni, S.H, Titi Dwi Hardiyanti S.H., Rizky Amalia S.H, Nurfadjrin Gabriella S.H yang sejak semester awal hingga akhir selalu bersama-sama berbagi cerita, suka duka di bangku perkuliahan dan membuat masa perkuliahan terasa sempurna;

13. Sahabat terdekat penulis, Nurzaitun Zenita Ismail, S.IP yang sudah seperti saudara penulis dan selalu mendengar keluhan penulis kapanpun dan dimanapun;
14. Sahabat-sahabat perempuan penulis yang selalu setia memberikan semangat dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini Lusi Rachmayanti, S.E., Rinda Andriani, Amelia Mentari, Nining Afrianti, A.Md, Nur Annisa Bachtiar S.H., Nurul Azizah, S.T., Fitriani Nursusanti, A.Md, Regina Safira Natalie, A.Md.Keb, Mitha Lestariani, S.E., Soraya Aisyah Sofyan, S.Ds., Yuni Muwarni.
15. Sahabat Laki-laki penulis, Imam Setiadi Munawan, S.E, Andi Fachrul Prasetyo, S.E., Ariputra Nugraha, Farid Abdullah, Mario Al Anshari, Ari Febriansyah, S.Sos yang selalu bersedia mendengarkan keluhan penulis kapanpun dan selalu memberikan semangat kapanpun;
16. Untuk PR Squad terima kasih sudah bersedia membantu penulis, mendengar keluhan penulis dan menemani penulis saat bimbingan;
17. Teman-teman KKN REGULER Gel. 93 Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Jagong, Fajar Arfah, S.T., Nurfalila Qurnaeni, S.H., Mauizatul Hasanah, S.Sos., Dwi Syahnaz, S.Kom., Ardiansyah, S.T., Vivit Aprilia, S.IP., Fachruddin, S.Pi., Auliah Rachmah, S.Hut., terima kasih telah

menjadi teman hidup selama hampir 2 bulan dan membuat cerita baru dalam hidup penulis;

18. Untuk Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ibu aji, Bapak aji dan Warga Kampung Balanakang yang sudah seperti orangtua penulis sekaligus keluarga penulis selama KKN, yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis;
19. Untuk Bapak Camat dan Seluruh Pegawai Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang sudah membimbing dan memberikan arahan penulis selama masa Magang.
20. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya penulis bisa lebih baik lagi. *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juni 2017

Penulis

ABSTRAK

Aqisyiah Rifdaeni Amalia (B12113507), dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar**”. Di bawah bimbingan Abdul Razak selaku Pembimbing I dan Romi Librayanto selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bidang Hukum dan Ham Balaikota Kota Makassar, DPRD Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut, (1) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar tidak berjalan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pendukung untuk membuktikan adanya pelaksanaan pengawasan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar (2) Faktor hukum (undang-undang) dan faktor sarana atau fasilitas pendukung menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	
.....	Error!

Bookmark not defined.

PENGESAHAN	
.....	Error!

Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Minuman Beralkohol	6
1. Pengertian Minuman Beralkohol	6
2. Golongan Minuman Beralkohol	7

3. Ketentuan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.....	8
a. Peredaran Minuman Beralkohol	8
1) Pengertian Peredaran	8
2) Surat Penunjukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Sebagai Syarat Peredaran Minuman Beralkohol.....	10
b. Penjualan Minuman Beralkohol	11
1) Pengertian Penjualan Minuman Beralkohol.....	11
2) Syarat Penjualan Minuman Beralkohol.....	12
2.1 Penjualan	12
2.1.1 Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	12
2.1.2Usia Konsumen Minuman Beralkohol	13
2.2 Waktu Penjualan Minuman Beralkohol	13
2.3Pelaporan Penjualan Minuman Beralkohol.....	14
2.4Labelisasi Penjualan Minuman Beralkohol.....	15
B. Pengawasan Minuman Beralkohol di Makassar	16
1. Pengertian Pengawasan	16

2. Penetapan Kewenangan Pelaksana Pengawasan	
Minuman Beralkohol	18
3. Subjek dan Objek Pengawasan Minuman	
Beralkohol.....	19
a. Subjek Pengawasan Minuman Beralkohol.....	19
b. Objek Pengawasan Minuman Beralkohol	20
4. Sanksi Administrasi dalam Peredaran dan	
Penjualan Minuman Beralkohol	21
C. Penegakan Hukum.....	24
1. Pengertian Penegakan Hukum.	24
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan	
Hukum.	25
a. Faktor Hukum.....	26
b. Faktor Penegak Hukum.....	27
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	29
d. Faktor Masyarakat.....	29
e. Faktor Kebudayaan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan	
Minuman Beralkohol di Kota Makassar	37
1. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman	
Beralkohol.....	39
2. Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman	
Beralkohol.....	41
a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penjualan	
Minuman Beralkohol.....	41
1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	41
2) Usia Konsumen Minuman Beralkohol.....	43
b. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Waktu	
Penjualan Minuman Beralkohol	45
c. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaporan	
Minuman Beralkohol.....	47
d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Labelisasi	
Minuman Beralkohol.....	49
B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pelaksanaan	
Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman	
Beralkohol.....	58
1.Faktor Hukum.	58
2.Faktor Sarana dan Fasilitas.	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jenis-jenis minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah yang dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.² Pada bidang perdagangan, khususnya perdagangan minuman beralkohol, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualannya sebagai wujud pelaksanaan dalam menjaga ketertiban masyarakat daerahnya, agar terhindar dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Salah satu langkah Pemerintah dalam mengendalikan serta mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dibentuk Peraturan Daerah yang dimana

¹ Lihat Pada Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Inu Kencana Syafii. 2015. Sistem Administrasi Negara. Bumi Aksara: Jakarta hal.129

pembentukannya berisi materi muatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pengendalian pengadaan serta perdagangan minuman beralkol yang dibentuk berdasarkan kewenangan DPRD Kota Makassar.

Jika diamati, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol yang menjadi alasan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan serta mengawasi Peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagai bentuk perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut, diaturnilai dari tingkat Peraturan Presiden sampai pada tingkat peraturan daerah.

Di Kota Makassar, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota yang dasar pembentukan Peraturannya untuk melaksanakan ketentuan pembentukan dari Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dengan menimbang Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai bentuk pemerintah daerah untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya di Kota Makassar.

Jika melihat kenyataan yang terjadi dampak minuman beralkohol, berdasarkan data dari WHO, dari tahun ke tahun adalah:

- Tahun 1998 di Indonesia, tercatat lebih dari 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) orang, meninggal karena penyakit khronis akibat konsumsi alkohol.
- Tahun 1999-2000, 58% angka kriminalitas terjadi ditengarai akibat pengaruh minuman beralkohol.

- Pada tahun 2000 diinformasikan bahwa, di Indonesia terdapat lebih dari 13.000 (tigabelas ribu) pasien penderita penyakit, terkait penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- Tahun 2001 tercatat 39 (tiga puluh sembilan) kasus kematian pada remaja karena Hepatitis B yang terkait erat dengan dampak pengkonsumsian alkohol (alcoholic cirrhosis, alcoholic cancer, chronic pancreas inflammation, and heart diseases).³

Berdasarkan riset Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), pada tahun 2014 jumlah remaja yang mengonsumsi miras melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa.⁴

Di Kota Makassar sendiri dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol terjadi di Jalan Kompleks IDI Makassar, dua pemuda saling pukul setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Salah satu warga sekitar tempat kejadian mengatakan, keduanya kerap melakukan pesta “miras” dan kerap mengganggu warga sekitar apabila telah mabuk. Bahkan salah seorang warga lainnya nyaris ditikam oleh pelaku.⁵

Selain dampak ketertiban, mengonsumsi minuman beralkohol juga sangat mempengaruhi kesehatan. Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) melaporkan setiap tahun 18.000 orang tewas baik efek langsung dan tidak langsung dari minuman beralkohol.⁶

³Lihat dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Fraksi PPP DPR RI <http://antimiras.com/peraturan/ruu-anti-miras/> diakses pada tanggal 4 Februari 2017 jam 20.36

⁴Berdasarkan riset Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) pada tahun 2014 <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11> diakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.59

⁵Sumber Info: <http://fajar.co.id/2016/12/25/mabuk-miras-baku-hantam-hingga-bersimbah-darah/> di akses pada tanggal 20 Januari 2017 jam 11.39

⁶Sumber: <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11> sdiakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.59

Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, di dalam pelaksanaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebaiknya dilakukan pengawasan dan penetapan sanksi yang tegas dalam menindaki para pelaku usaha minuman beralkohol, khususnya bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menarik isu tentang pelaksanaan pengawasan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pengawasan yang diberikan kewenangan dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol agar pengawasannya efektif dan tepat guna.
2. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggungjawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kewajiban dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung unsur ramuan memabukkan etanol (etil alkohol). Etanol merupakan bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa:

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁷

Pengertian Minuman beralkohol tersebut sejalan dengan uraian pengertian minuman beralkohol dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga di Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Golongan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, yang meliputi :

- Golongan A yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%
- Golongan B yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%
- Golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%⁸

Golongan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 diuraikan pula pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Untuk uraian jenis-jenis minuman beralkohol, akan dilampirkan dalam Skripsi Ini pada halaman lampiran.

⁸ Lihat pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

3. Ketentuan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol yang penggolongannya tersebut di atas, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.”⁹

Dimana setiap peredaran maupun penjualannya wajib dilakukan pengawasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Di Kota Makassar telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan, pengendalian pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

a. Peredaran Minuman Beralkohol

1) Pengertian Peredaran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Peredaran diartikan sebagai gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar.¹⁰ Jika dikaitkan dengan peredaran minuman

⁹ Lihat pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹⁰<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.37

beralkohol, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 mencantumkan pengertian Peredaran pada Pasal 1 angka 8 Ketentuan umum yang diartikan sebagai bagian kegiatan dari Perdagangan Minuman Beralkohol sesuai uraian berikut:

Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.¹¹

Peredaran merupakan kegiatan perdagangan yang dilaksanakan antara Produsen/IT-MB sampai ke penjualan sesuai yang dimaksudkan Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dilakukan oleh produsen atau IT-MB kepada distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (3) Sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengedarkan kepada penjual langsung minuman beralkohol;
- (4) Penjual minuman beralkohol hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari sub distributor atau distributor;
- (5) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A Distributor atau sub distributor wajib

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

bertanggung jawab terhadap penjualan langsung yang ditunjuk¹²

Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, peredaran merupakan kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.¹³

2) Surat Penunjukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Sebagai Syarat Peredaran Minuman Beralkohol

Peredaran minuman beralkohol dilakukan berdasarkan surat penunjukan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Produsen atau IT-MB terhadap distributor dan distributor terhadap Sub distributor sesuai yang tersirat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dilakukan oleh produsen atau IT-MB kepada

¹²Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹³Lihat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

- distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - (3) Sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengedarkan kepada penjual langsung minuman beralkohol;
 - (4) Penjual minuman beralkohol hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari sub distributor atau distributor;
 - (5) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A Distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhdap penjualan langsung yang ditunjuk¹⁴

b. Penjualan Minuman Beralkohol

1) Pengertian Penjualan

Penjualan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjual.¹⁵ Jika dikaitkan dalam Penjualan minuman beralkohol, penjualan tersebut diartikan sebagai kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi¹⁶ yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014. Penjelasan tentang penjualan minuman beralkohol tidak ada disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-

¹⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹⁵ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.58

¹⁶ Lihat Pada Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Syarat Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014. Ketentuan tersebut telah diatur dalam BAB V Penjualan minuman beralkohol yang meliputi tempat penjualan, ketentuan usia konsumen, waktu penjualan, pelaporan, dan labelisasi minuman beralkohol.

2.1 Penjualan Minuman Beralkohol

2.1.1 Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- (1) Hotel, bar, diskotik, karaoke, dan pub sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan;
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud huruf a adalah hotel bintang 5, bintang 4, dan bintang 3;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan

mempertimbangkan tidak berdekatan dengan rumah tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.¹⁷

2.1.2 Usia Konsumen Minuman Beralkohol

Dalam penjualannya, batas usia konsumen minuman beralkohol juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur batas usia *minimum* konsumen dalam Pasal 6, dengan uraian sebagai berikut:

Penjual minuman beralkohol dimaksud dalam pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas dan/atau paspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

2.2 Waktu Penjualan Minuman Beralkohol

Penjual langsung minuman beralkohol di Kota Makassar hanya diijinkan melakukan penjualan pada waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 yang ketetapannya berupa:

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a hanya diijinkan melakukan penjualan:

¹⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- a. di hotel pada siang hari jam 13.00-15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00-24.00 WITA;
 - b. Selain di hotel hanya diizinkan pada malam hari dimulai pada jam 22.00 WITA sampai dengan Jam 01.00 WITA;
 - c. Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam,
- (2) Pada bulan ramadhan tidak diperbolehkan berjualan minuman beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Untuk Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).¹⁹

2.3 Pelaporan Minuman Beralkohol

Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada walikota berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada walikota melalui Kepala Dinas perdagangan Kota Makassar
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September;

¹⁹ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan dan dilakukan.²⁰

2.4 Labelisasi Minuman Beralkohol

Setiap minuman beralkohol golongan A,B, dan C produk dalam negeri atau produk impor yang bertujuan untuk dikonsumsi dalam negeri wajib dilengkapi label sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 yang ketentuannya diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A,B,dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai;
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar Bahan Digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal,bulan,dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkohol” dan;

²⁰ Lihat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- h. Tulisan peringatan “di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.²¹

B. Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang seharusnya atau yang telah ditetapkan. Muchsan memberikan pendapat yang dikutip oleh Sirajuddin DKK tentang pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”²²

Pengawasan merupakan poin penting untuk mengetahui efektif tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan organisasi daerah sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di daerah. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1. Efektivitas; kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan

²¹ Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

²² Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. Hukum Pelayanan Publik. Setara Press: Malang, Jawa Timur hal. 126

2. Legitimitas; kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan
3. Yuridiktas; syarat-syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
4. Legalitas; syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih, keadaan darurat, keadaan itu wajib dibuktikan. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan.
5. Moralitas; salah satu syarat yang paling diperhatikan dalam masyarakat, Moral dan Etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi.
6. Efisiensi; wajib dikejar seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.²³

Jika dikaitkan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, pengawasan tersebut sebagai wujud penyelenggaraan tugas pemerintahan yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014. Menurut asumsi penulis pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol bisa dikategorikan ke dalam jenis Pengawasan Represif yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.²⁴ Perda menunjuk Walikota sebagai pelaksana pengawasan dan dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur terkait dan

²³ Makhfudz. 2013. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta hal.12

²⁴ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Negara*. cetakan kedua. PT. Rineka Cipta: Jakarta hal.29

memahami substansi kerja objek yang diawasi untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi.

2. Penetapan Kewenangan Pelaksana Pengawasan Minuman Beralkohol

Pelaksana memiliki arti orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya).²⁵ Jika dikaitkan dengan pelaksana pengawasan minuman beralkohol penulis berpendapat bahwa pelaksana pengawasan merupakan orang dan/atau panitia, organisasi, dan sebagainya yang melaksanakan atau mengerjakan tugas pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, menetapkan bahwa:

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.²⁶

Dalam pelaksanaan pengawasannya dapat dibentuk tim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian

²⁵ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksana> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.39

²⁶ Lihat pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²⁷

3. Subjek dan Objek Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

a. Subjek Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Subjek menurut KBBI memiliki definisi orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.²⁸ Jika dikaitkan dengan pengawasan penulis berpendapat bahwa subjek pengawasan merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam pengawasan dan/atau bertindak sebagai yang diawasi. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Begitu pula dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, agar peredarannya tetap di dalam

²⁷ Lihat Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

²⁸ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.33

kendali sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf a dan b bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. IT-MB, produsen, distributor, dan sub distributor;
- b. Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, serta penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;²⁹

Yang dimaksud dari Pasal 20 Ayat (2) huruf a dan b tersebut merupakan subjek pengawasan minuman beralkohol yang diberlakukan terhadap seluruh oknum dalam aktivitas peredaran dan penjualan minuman beralkohol mulai dari produsen/IT-MB sampai dengan penjual langsung minuman beralkohol semua golongan dan kemasan.

b. Objek Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Penulis berpendapat bahwa objek pengawasan merupakan aktivitas yang diawasi dalam pelaksanaan

²⁹ Lihat pada Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

suatu rencana, dan kesesuaian dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jika dikaitkan dalam Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf c dan d Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap:

- a. perizinan, impor, pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan kemasan; dan
- b. Tempat/lokasi penyimpanan, minuman beralkohol golongan B dan golongan C.³⁰

3. Sanksi Administrasi dalam Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Hal administrasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol harus diberlakukan mekanisme pemberian sanksi yang efisien dan keefektifannya terjamin sebagai upaya mewujudkan terkendalinya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar. Salah satu wujud ketetapan Pemerintah Kota Makassar dalam hal mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol diberlakukannya sanksi administrasi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:

Setiap orang produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

³⁰ Lihat pada Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

- a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- b. pemanggilan;
- c. penutupan sementara tempat usaha;
- d. pencabutan izin.³¹

Sanksi tersebut dilaksanakan apabila pelaku usaha melanggar beberapa ketentuan meliputi Waktu Penjualan (Pasal 7), Pelaporan (Pasal 8), Penyimpanan Minuman Beralkohol (Pasal 15) yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a hanya diijinkan melakukan penjualan:
 - c. di hotel pada siang hari jam 13.00-15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00-24.00 WITA;
 - d. Selain di hotel hanya diizinkan pada malam hari dimulai pada jam 22.00 WITA sampai dengan Jam 01.00 WITA;
 - e. Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam,
- (2) Pada bulan ramadhan tidak diperbolehkan berjualan minuman beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Untuk Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)³²

Pasal 8

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada walikota melalui Kepala Dinas perdagangan Kota Makassar
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

³¹Lihat Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

³² Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September;
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota melalui kepala dinas perindustrian dan perdagangan dan dilakukan.³³

Pasal 15

- (1) Produsen, Distributor, Sub Distributor dan penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang lain;
- (2) Pemasukan dan Pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan;
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat sekurang-kurangnya jumlah, merek tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang dan asal barang;
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.³⁴

Mengenai penjatuhan sanksi tersebut tata caranya diatur dalam peraturan walikota sesuai amanat Pasal 22 Ayat (2) yang berisi:

Tata Cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.³⁵

³³ Lihat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁴ Lihat Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁵ Lihat Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dimana sampai saat ini, belum ada Peraturan Walikota Makassar sebagai bentuk uraian tata cara penjatuhan sanksi administrasi tersebut.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum diperlukan penegakan hukum sebagai perwujudan tindakan untuk memastikan seluruh sistem hukum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁶

Menurut ten Berge, yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yang dikutip lagi oleh Ridwan H.R. menyebutkan bahwa penegakan hukum khususnya dalam hal penegakan Hukum Administrasi Negara memiliki instrumen yang meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.³⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar berjalan dengan baik dan dalam hal penegakan hukum administrasi negara instrumen penegakannya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengukur

³⁶ Satjipto Rahardjo.1983.*Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru:Bandung.hal. 24

³⁷ Ridwan HR.2013.*Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers:Jakarta hal. 296

keefektifitasan penegakan hukum, sebagai esensi dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³⁸

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum tersebut penulis berpendapat bahwa untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya,

³⁸ Soerjono Soekanto.2014.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.RajaGrafindo Persada:Depok.hal.8

³⁹*Ibid*, hal.8

lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto adalah Peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Pengertian Peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

Salah satu dasar yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah asas-asas pembentukan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

⁴⁰ *Ibid*, hal. 11

⁴¹ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.⁴²

Sedangkan dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang terdapat beberapa gangguan seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, dimana gangguan tersebut disebabkan karena:

- 1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴³

b. Faktor Penegak Hukum

Jimly Asshiddiqie mengemukakan penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.⁴⁴

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.⁴⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis berpendapat bahwa penegak hukum merupakan oknum

⁴² Lihat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴³ Soerjono Soekanto *Op.cit.*, hal.17-18

⁴⁴ Sumber: www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 13 Februari 2017 jam 22.35

⁴⁵ Soerjono Soekanto *op.cit.*, hal.19

yang menegakkan hukum agar sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku.

Penulis juga berpendapat bahwa setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan berdasarkan pada masing-masing lembaga yang ditempatkan, dimana setiap kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh setiap penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan yang terdiri dari:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia yang berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.⁴⁶

Menurut uraian Soerjono Soekanto di atas penulis menarik kesimpulan bahwa halangan-halangan tersebut mengacu pada peranan penegak hukum sebagai tindakan yang diidentikkan dengan tingkah laku nyata dalam penegakan hukum.

⁴⁶*Ibid*, hal. 34-35

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan danampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁴⁷

Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagaimana berikut:

1. Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang – ditambah
4. Yang macet – dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁴⁸

d. Faktor Masyarakat

Dalam masyarakat berbagai macam kepentingan dalam segala macam bentuk saling bertemu, ini menyebabkan berkembangnya hukum secara

⁴⁷*Ibid.* hal. 37

⁴⁸*Ibid.* hal.44

pesat.⁴⁹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁵⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa setiap masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika masyarakat:

- a. tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
- d. tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;

⁴⁹ Mudjiono.1991.*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*.Liberty Yogyakarta:Yogyakarta.hal.7

⁵⁰ Soerjono Soekanto *Op.cit.* hal.45

- e. mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁵¹

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Andreas Eppink, Pengertian kebudayaan secara umum memiliki pengertian bahwa:

Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas masyarakat.⁵²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan dianut serta apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁵³

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁵⁴

Jika dikaitkan kedua pendapat di atas penulis berpendapat bahwa kebudayaan merupakan kebiasaan yang terbentuk dan menjadi ciri khas masyarakat serta

⁵¹*Ibid.* hal 57

⁵²Beni Ahmad Saebani.2012.*Antropologi Hukum*.CV.Pustaka Setia:Bandung hal.100

⁵³Soerjono Soekanto *Op.cit.* hal 60

⁵⁴*Ibid.* hal 60

mengandung nilai-nilai yang lahir dari sikap dan perilaku masyarakat dilingkungan setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kota Makassar

B. Populasi dan Sampel

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini, yang Populasinya terdiri dari:

- 1) Pelaku Usaha Minuman Beralkohol di Kota Makassar
- 2) Konsumen Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Alasan penulis memilih kedua populasi tersebut adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana metode ini dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu dengan alasan tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁵⁵ Oleh karena itu penulis menentukan sampel sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha minuman beralkohol minum langsung sejumlah 2 (dua) sampel
- 2) Konsumen minuman beralkohol sejumlah 3 (tiga) orang.

⁵⁵ Said Sampara, dkk.2017.*Metode Penelitian Hukum edisi Revisi*.Kretakupa Print;Makassar hal.95

C. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :

1) Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada masyarakat, dalam hal ini, pelaku usaha dan konsumen.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.

Sumber data yang penulis dapatkan berasal dari :

- 1) Walikota Makassar yang di disposisikan ke bagian Hukum dan Ham Balaikota Makassar
- 2) Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar
- 3) Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:⁵⁶

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penulisan skripsi ini.

2) Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi), dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait atau berkompeten.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta

⁵⁶Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 176.

pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Pelaksanaan pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Walikota yang telah ditetapkan dalam pasal Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.⁵⁷

Pertama-tama penulis menjabarkan kembali objek-objek yang diawasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Objek Pengawasan terdapat dalam Pasal 20 huruf c dan d pengawasan dilakukan terhadap:

- c. perizinan, impor, pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan kemasan; dan
- d. Tempat/lokasi penyimpanan, minuman beralkohol golongan B dan golongan C.⁵⁸

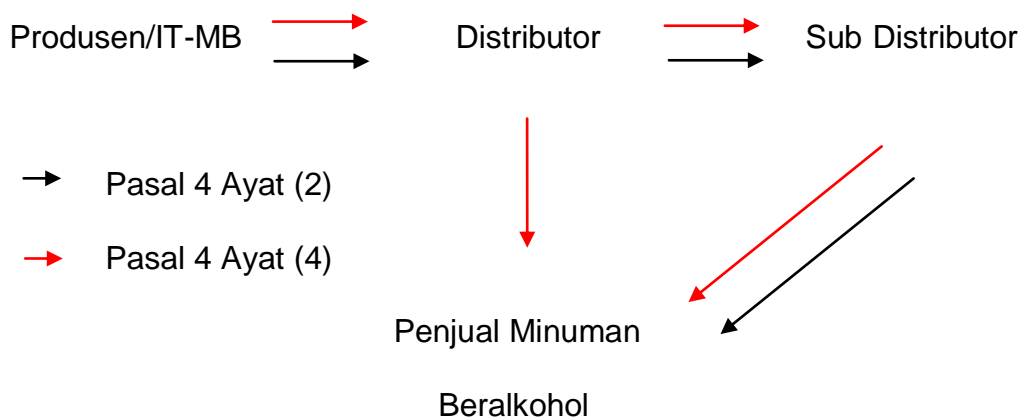
Untuk menjawab rumusan masalah penulis yang pertama, tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman

⁵⁷ Lihat pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁵⁸ Lihat Pada Pasal 20 huruf c dan d Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

beralkohol di Kota Makassar, yang dimana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut meliputi:

1. Untuk Peredarannya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, yang menjabarkan tentang peredaran berdasarkan surat penunjukan dari asal didapatkannya minuman beralkohol melalui perjanjian kerjasama sebagai syarat peredaran minuman beralkohol, yang jika digambarkan jalur peredarannya adalah sebagai berikut:



2. Untuk Penjualannya diatur dalam BAB Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, yang objeknya meliputi: Tempat Penjualan, Usia Konsumen, Waktu Penjualan, Pelaporan, dan Labelisasi

Berikut penulis uraikan hasil dan data penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol yang meliputi:

1. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Peredaran minuman beralkohol merupakan salah satu objek pengawasan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 yang ketentuannya mengatur:

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dilakukan oleh produsen atau IT-MB kepada distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (6) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (7) Sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengedarkan kepada penjual langsung minuman beralkohol;
- (8) Penjual minuman beralkohol hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari sub distributor atau distributor;
- (9) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A Distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhdap penjualan langsung yang ditunjuk⁵⁹

Hal yang diawasi pada peredaran minuman beralkohol adalah Surat Penunjukan yang berdasarkan perjanjian kerjasama mulai dari distributor sampai kepada

⁵⁹Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

penjual minuman beralkohol. Berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan, beliau menyatakan:⁶⁰

“Sering kami cek surat penunjukannya, tapi kan tidak mungkin kami mau ambil.”

Namun dari keterangan beliau, tidak jelas menunjukkan apakah pengawasan terhadap surat penunjukan melalui perjanjian kerjasama tersebut dilakukan terhadap distributor, sub distributor, atau pun penjual langsung minuman beralkohol. Hal tersebut dapat dibuktikan karena tidak adanya daftar distributor, sub distributor, dan penjual langsung minuman beralkohol yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan. Dinas perdagangan hanya memiliki data daftarpenjual langsung yang memiliki izin minuman beralkohol. Menurut penulis, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, karena SKPD yang melakukan pengawasan tidak memiliki daftar rinci tentang pelaku usaha, mulai dari distributor sampai penjual langsung. Jika tidak memiliki daftar distributor dan subdistributor, sulit untuk membuktikan asal muasal produk minuman beralkohol yang beredar, apakah dari distributor, subdistributor atau ilegal. Untuk membenarkan analisis

⁶⁰Hasil Wawancara tanggal 4 Mei 2017

penulis, Dinas Perdagangan memberikan format daftar kunjungan dalam rangka pengawasan minuman beralkohol yang juga tidak mencantumkan kolom untuk nomor surat penunjukan sebagai bukti terlaksananya pengawasan peredaran minuman beralkohol terhadap para pelaku usaha, mulai dari tingkat distributor sampai ke para penjual langsung minuman beralkohol.

2. Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol

a. Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu objek pengawasan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar yang membahas poin-poin sebagai berikut:

1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam BAB Penjualan, membahas tentang tempat penjualan minuman beralkohol, dimana Walikota menetapkan tempat-tempat penjualan secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan pertimbangan-pertimbangan, yang dimana salah satu ayat dalam Pasal tersebut menetapkan:

- (3) Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidak berdekatan dengan

rumah tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.⁶¹

keterangan juga diperoleh dari Dinas Perdagangan yang dikemukakan oleh Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan, dimana menyebutkan bahwa:

“iya kita awasi, itu memang tidak boleh mereka sembarang menjual, harus jauh dari tempat-tempat sosial, keagamaan, ada memang lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan menjual, makanya kita juga tidak sembarang kasih izin.”⁶²

Namun faktanya, penulismendapati tempat penjualan minuman beralkohol yang lokasinya dekat dengan lembaga pendidikan dan tempat peribadatan. Salah satunya Kios Devi di Jalan Kumala Kota Makassar yang selisih dua rumah dengan Kompleks TK, SD, SMP Yapend Makassar.

Dari fakta dan keterangan yang diberikan oleh pihak Dinas Perdagangan bertolak belakang, karena masih ada tempat yang menjual minuman beralkohol berdekatan dengan lingkungan lembaga pendidikan. Hal tersebut membuktikan tidak adanya pengawasan mengenai tempat penjualan minuman beralkohol seperti yang dikemukakan oleh Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan yang mewakili Dinas Perdagangan.

⁶¹ Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁶² Hasil Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017

2) Usia Konsumen Minuman Beralkohol

Usia Konsumen Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Perda, adalah konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, untuk pengawasannya Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan Mengungkapkan:⁶³

“Kalau untuk konsumen kan, tidak mungkin kita jaga di semua tempat usaha, apakah pelaku usaha meminta untuk menunjukkan kartu identitas konsumen.”

Penulis juga meminta keterangan beberapa konsumen minuman beralkohol, dari tiga orang konsumen minuman beralkohol pada saat pembelian tidak ada yang dimintai Kartu Tanda Penduduk sebagai pembuktian kalau konsumen tersebut telah berusia di atas 21 Tahun, sebagai berikut:⁶⁴

“Saya beli minol di publiq, tidak pernah ji dimintai KTP”

Konsumen lain juga mengatakan membenarkan:⁶⁵

“Tidak dimintaji KTP ku, di Kios semarang sama popsa”

“Tidak diminta ji KTP, langsung ja saja kasih tau merk minolnya”

Untuk mengakurasi keterangan dari konsumen-konsumen minuman beralkohol, penulis melakukan

⁶³ Hasil Wawancara tanggal 4 Mei 2017

⁶⁴ Hasil Wawancara Pada tanggal 12 Juni 2017

⁶⁵ Hasil Wawancara Pada tanggal 12 Juni 2017

konfirmasi ke salah satu tempat penjualan langsung minuman beralkohol yang terletak di Jalan Arief Rate Makassar, dari keterangan salah satu pramuniaga dari *café* tersebut menyatakan:⁶⁶

“Rata-rata konsumen minuman beralkohol disini itu jumlahnya 70% dari tamu yang datang, kisaran usianya sekitar 25-40 tahun.”

Beliau juga menambahkan :

“Cara untuk tau usianya konsumen, ya ditebak-tebak saja, tapi beberapa saya kenal akrabji konsumennya.”

Dari keterangan-keterangan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan untuk penjualan terhadap konsumen minuman beralkohol yang telah berusia 21 Tahun tidak berjalan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa keterangan konsumen minuman beralkohol yang tidak diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk sebagai pembuktian konsumen telah berusia 21 Tahun dan diperkuat dengan keterangan dari salah satu pramuniaga *café* bahwa untuk menentukan usia konsumen hanya berdasarkan tebakan, bukan diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk saat membeli/memesan minuman beralkohol.

⁶⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 15 Juni 2017

b. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Waktu Penjualan

Minuman Beralkohol

Waktu penjualan juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, dari keterangan Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan yang menyatakan:⁶⁷

“Kalau pengawasan untuk waktu penjualannya itu ikut dengan waktu-waktu tempat hiburan malam, dari habis maghrib sampai dengan jam 2 malam, kalau penjualan eceran itu yang jelas dia tidak menjual pada hari-hari keagamaan dan bulan ramadhan.”

Keterangan di atas tidak sejalan, dengan yang telah diatur dalam Perda untuk waktu penjualan, dimana penjualan minuman beralkohol dilakukan pada:

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a hanya diijinkan melakukan penjualan:
 - a. di hotel pada siang hari jam 13.00-15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00-24.00 WITA;
 - b. Selain di hotel hanya diizinkan pada malam hari dimulai pada jam 22.00 WITA sampai dengan Jam 01.00 WITA;
 - c. Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum1 (satu) jam,
- (2) Pada bulan ramadhan tidak diperbolehkan berjualan minuman beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Untuk Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara tanggal 4 Mei 2017

⁶⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Penulis juga meminta keterangan dari beberapa konsumen minuman beralkohol yang membeli di luar jam yang telah ditentukan:⁶⁹

“Saya pernah beli minuman alkohol di kios semarang, sebelum jam 10 malam, dan tetap dilayani.”

Keterangan dari konsumen lain juga menyebutkan:⁷⁰

“Pernah saya beli Bir di Kampung Popsa Sore sekitar jam 5”

Penulis kemudian, melakukan konfirmasi ke salah satu *café* yang menjual minuman beralkohol, dari keterangan beliau menyebutkan bahwa:⁷¹

“Tidak adaji diatur jam-jam tertentu konsumen untuk membeli, paling sampai *café* tutupji”

Dari keterangan-keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan untuk waktu penjualan tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan pelaksana pengawasan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah serta kesaksian beberapa konsumen minuman beralkohol yang pernah membeli di luar jam penjualan, dibenarkan pula oleh pramuniaga salah satu *café* di Kota Makassar bahwa waktu

⁶⁹ Hasil Wawancara Pada tanggal 16 Mei 2017

⁷⁰ Hasil Wawancara Pada tanggal 16 Mei 2017

⁷¹ Hasil Wawancara Pada tanggal 16 Juni 2017

penjualan minuman beralkohol tidak ada waktu-waktu tertentu, batasnya sampai *café* tersebut tutup.

c. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaporan Minuman Beralkohol

Pelaporan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh penjual langsung minuman beralkohol, kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar yang format laporannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, Namun menurut keterangan Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan:⁷²

“Dalam hal pelaksanaan pengawasan pelaporan, pelaku usaha melaporkannya bukan kepada kami, tapi kepada dinas perdagangan tingkat provinsi, dari provinsi nanti mereka yang kirim hasil datanya ke dinas perdagangan kota”

Namun, dalam ketentuan peraturannya, kewenangan untuk menerima laporan realisasi penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perdagangan Kota Makassar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya

⁷²Hasil Wawancara Pada tanggal 16 Mei 2017

- kepada walikota melalui Kepala Dinas perdagangan Kota Makassar
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
- a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September;
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.⁷³

Penulis melakukan konfirmasi ke salah satu pegawai Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan, juga selaras mengatakan bahwa

“pelaporan realisasi minuman beralkohol dilakukan oleh tingkat kota/kabupaten dulu, baru setelah itu dilaporkan kembali ke Gubernur melalui Dinas Perindag Provinsi.”⁷⁴

Berdasarkan keterangan yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pengawasan penjualan khususnya pelaporan realisasi penjualan tidak dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan narasumber, dan belum adanya aturan bentuk serta format khusus untuk

⁷³Lihat Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁷⁴Hasil Wawancara pada tanggal 16 Juni 2017

pelaporan, dikarenakan belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur hal tersebut.

d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Labelisasi Minuman Beralkohol

Pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol pada poin labelisasi minuman beralkohol, tidak berjalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada produk minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa minuman beralkohol serta tidak adanya pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9 Perda Kota Makassar Nomor Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar Bahan Digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkohol” dan;

h. Tulisan peringatan “di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.⁷⁵

Sebagai bukti, penulis akan menunjukkan salah satu contoh kemasan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat label yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, penulis akan menguraikan analisis tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Walikota dengan menunjuk SKPD terkait, dalam hal pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dinas Perdagangan yang diwakili oleh Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan mengatakan⁷⁶

“Mengenai pengawasan minuman beralkohol, kami telah melakukan pengawasan secara rutin tapi tanpa jadwal khusus, memeriksa langsung ke restoran-restoran yang menjual minuman beralkohol dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014.”

“Pengawasan memang perlu karena kalau peredaran alkohol tidak diawasi, akibatnya berbahaya, seperti, minimarket yang jual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi, dan yang seperti ini tidak boleh dibiarkan menjamur karena efeknya berdampak pada ketertiban dan keamanan masyarakat itulah sebabnya kami melakukan pengawasan dalam hal penjualan minuman beralkohol.”

Beliau juga mengatakan bahwa

“Pengawasan yang kami lakukan juga dibantu oleh SATPOL-PP sebagai penegak Peraturan Daerah dalam hal penyidikannya, selain SATPOL-PP kami juga biasa didampingi oleh Aparat Polri”

Dari keterangan di atas, Penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan untuk menilai suatu

⁷⁵ Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁷⁶ Hasil Wawancara tanggal 13 Maret 2017

bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan secara fakta dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hal tersebut sejalan dengan pengertian pengawasan yang dikatakan oleh Muchsan dan dikutip oleh Sirajuddin DKK bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”⁷⁷

Jika dikaitkan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pengawasan adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Selanjutnya, dikesempatan lain penulis meminta keterangan kembali kepada Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan tentang pelaksanaan pengawasan yang melibatkan SATPOL-PP atau instansi lain, Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan koordinasi melalui Surat Permintaan Tenaga Teknis, sesuai yang disampaikan beliau⁷⁸

“Biasanya kalau kita berkoordinasi dengan SKPD lain itu melalui Surat Permintaan Tenaga Teknis, terus nanti dibalasmi, tapi

⁷⁷ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. Hukum Pelayanan Publik. Setara Press: Malang, Jawa Timur hal. 126

⁷⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 6 April 2017

kayaknya kalau untuk minuman beralkohol itu satpol pp bekerja sama dengan BPOM”

Dalam kesempatan berbeda penulis mendapatkan informasi, dimana saat ini dinas perdagangan sudah memiliki bidang khusus yang melakukan pengawasan perdagangan. Untuk Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol Walikota Makassar telah membentuk tim pengawasan, melalui Surat Keputusan Walikota dengan nomor 783/700.510.05/KEP/II/2017 tentang pembentukan panitia terpadu pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tahun anggaran 2017 yang telah ditetapkan di Makassar pada tanggal 6 Februari 2017, sebelum adanya keputusan walikota terkait pembentukan tim terpadu, pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di bawah oleh bidang perdagangan yang pelaksanaannya bersifat rahasia seperti, yang dikemukakan oleh Bapak Randy selaku pegawai dalam bidang pengawasan Dinas perdagangan Kota Makassar bahwa⁷⁹

“ Bidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian ini baru dibentuk, dan untuk pengawasan minuman beralkohol kami melaksanakannya berdasarkan SK Walikota tahun 2017, jadi sebelum ditetapkannya tim terpadu, pelaksanaan pengawasan di bawah oleh bidang perdagangan, dan pengawasannya itu dilakukan secara rahasia, mengenai SOP dalam pelaksanaannya, kami disini masih sementara membuat, untuk SOP yang lama bisa dikoordinasikan ke bidang perdagangan”.

Beliau juga menambahkan

⁷⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 21 Maret 2017

“Sebelum melaksanakan pengawasan kami terlebih dahulu membina para pelaku usaha, kami sosialisasikan tentang peraturannya, kalau ada yang melanggar kami lakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan.”

Penulis selanjutnya meminta keterangan dari Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan tentang SOP pelaksanaan pengawasan sebelum dibentuknya bidang khusus pengawasan dan sebelum adanya SK Walikota dari keterangan beliau menyebutkan⁸⁰

“SOP nya itu kita pakai peraturan menteri dan peraturan direktur jenderal Perdagangan dalam negeri yang membahas tentang Juknis dalam hal pelaksanaan pengendalian peredaran, termasuk pengawasannya”

Jadi, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol telah dilaksanakan oleh Dinas perdagangan dipimpin oleh Walikota Makassar selaku pembina berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan nomor 783/700.510.05/KEP/II/2017, sebagai wujud pengujian apakah para pelaku usaha minuman beralkohol telah melakukan kegiatan perdagangan dan peredaran berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, dimana sebelum dikeluarkannya SK Walikota Dinas Perdagangan juga telah melaksanakan pengawasan, yang standar operasional prosedurnya adalah peraturan menteri dan peraturan direktur jenderal perdagangan dalam negeri nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Namun menurut penulis pelaksanaan

⁸⁰ Hasil Wawancara pada tanggal 21 Maret 2017

pengawasan tersebut tidak dapat berjalan sebelum adanya Peraturan Walikota dan SK Walikota, seyogyanya Peraturan Turunan, harus secepatnya ditetapkan setelah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 diundangkan, dengan didahului oleh Peraturan Walikota sebagai bentuk tata cara pelaksanaan, penjatuhan sanksi dan pemberian kewenangan dari walikota Makassar kepada SKPD terkait, melalui SK untuk membentuk tim terpadu oleh Walikota Makassar, diperlukan pula Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, karena jika standar operasional prosedurnya mengacu pada peraturan dirjen perdagangan tentang Juknis, yang notabene berlaku nasional, dimana menurut penulis keadaan dan kebutuhan setiap daerah berbeda dan peraturan daerah yang ditetapkan pun berbeda, meskipun membahas permasalahan yang sama. Selain itu dasar dari mengingat SK walikota tersebut tidak menyebutkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 sebagai dasar pembentukan SK Walikota Nomor 783/700.510.05/KEP/II/2017.

Hasil dari pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap para pelaku usaha minuman beralkohol, Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan mengemukakan⁸¹

“Kalau hasil pengawasan kami selama ini tujuannya mengurangi masalah-masalah yang terjadi, yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol.”

⁸¹ Hasil Wawancara pada tanggal 6 April 2017

Dasar pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di Kota Makassar adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 September 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar pada tanggal 18 Oktober 2014.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan di Kantor DPRD Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 merupakan peraturan inisiatif dewan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hamzah Hamid selaku salah satu anggota DPRD dan panitia khusus dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, beliau mengatakan bahwa⁸²

“Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang minol itu dibentuk berdasarkan inisiatif dari dewan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol.”

Di dalam pelaksanaan pengawasan, Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 2014 tidak menunjuk khusus SKPD untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, penulis selanjutnya melakukan konfirmasi ke Kantor Balaikota Makassar untuk mencari tahu apakah Walikota Makassar sudah menetapkan Peraturan turunan dari Peraturan Daerah, terkait pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan

⁸² Hasil Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017

penuturan Kepala Sub Bidang Hukum dan HAM Ibu Asma, mengatakan bahwa⁸³

“Apa yang anda baca di Perda, sudah menjadi teknisnya, Bagaimana mekanismenya, prosesnya, bisa anda liat mi saja di PERDA, Ada timnya dan semua itu sudah termasuk teknisnya, dan untuk pelaksanaannya bisa langsung minta keterangan sama disperindag”

Salah satu pegawai di Bidang Hukum dan HAM kantor Walikota Makassar, juga memberikan keterangan tentang pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, beliau mengatakan bahwa⁸⁴

“Pengawasan peredaran dan penjualan minol itu sudah kewajibannya disperindag sesuai tupoksinya, karena disperindag merupakan SKPD yang mengurus segala macam penjualan salah satunya peredaran dan penjualan minol, jadi biar tidak diamanatkan oleh perda, kan sudah ada tupoksinya, itu saja jadi dasar pengawasannya”

Dari keterangan-keterangan di atas penulis beranggapan bahwa pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol sebelum adanya SK Walikota, pelaksanaannya berdasarkan tupoksi dari Dinas Perdagangan sebagai kegiatan rutin, hal tersebut dapat dibuktikan pada lampiran berupa daftar kunjungan dalam rangka pengawasan minuman beralkohol yang penulis dapatkan dari Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Untuk mengetahui langsung dampak pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol penulis juga mendatangi ke beberapa tempat hiburan malam yang menjual minuman berakohol salah satunya

⁸³ Hasil Wawancara pada tanggal 1 Maret 2017

⁸⁴ Hasil Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017

Cafe Dangdut di Jalan Nusantara, dari hasil wawancara penulis kepada pengelola*cafe* tersebut mengatakan bahwa⁸⁵

“Disini memang biasa didatangi oleh pihak pemerintah untuk mengawasi, tapi kalo dalam hal mengawasi miras biasanya yang datang itu dari dispemda, satpol pp, dan polisi selain dari itu seingat saya tidak ada, hanya mereka yang datang biasa 3 bulan sekali, kalo tidak salah juga pernah kami diundang untuk sosialisasi tentang aturan-aturan.”

Beliau juga menambahkan

“Kalau untuk penjualan minuman beralkohol disini bisa minum langsung dan bawa pulang tergantung dari pelanggannya”

Dikesempatan yang sama penulis mendatangi *Cafe Metro Sulawesi* yang terletak di Jalan Sulawesi Kota Makassar, salah satu pengelola *cafe* tersebut mengemukakan⁸⁶

“Dari pihak pemerintah sendiri sering datang mengecek mengenai izin penjualan minuman beralkohol, selain itu mereka juga mengecek SITU, SIUP, yang biasa datang dari SATPOL, kalau untuk dinas-dinas kita kurang tau karena biasanya mereka hanya menunjukkan surat untuk mengecek siapa-siapa yang gabung dengan satpol kami kurang perhatikan, mereka pernah melakukan penindakan langsung yaitu menyita minuman tanpa surat teguran dan meminta keterangan terlebih dahulu, kalau masalah sosialisasi peraturan kami pernah diajak”

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan pengelola *cafe* tersebut penulis berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol belum diterapkan karena masih ada *cafe* atau tempat hiburan malam yang seharusnya hanya menjual minuman beralkohol secara minum langsung, tapi *cafe* tersebut juga menjual secara eceran. Selain itu masalah penindakan langsung yaitu

⁸⁵ Hasil Wawancara pada tanggal 1 April 2017

⁸⁶ Hasil Wawancara pada tanggal 1 April 2017

menyita minuman beralkohol tanpa surat teguran tidak dibenarkan, karena jika pelaksanaan pengawasan dan penindakan tersebut berdasar pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, telah ditetapkan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) yang menyebutkan:

- Setiap orang produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pencabutan izin.⁸⁷

Meskipun dalam tata cara penjatuhan sanksinya belum diatur oleh Peraturan Walikota sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan:

Tata Cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.⁸⁸

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol diharapkan akan dapat membatasi beredarnya minuman beralkohol secara ilegal dan yang melanggar ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis setelah melakukan penelitian, berikut ini

⁸⁷ Lihat Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁸⁸ Lihat Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

beberapa faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar ada (2) dua, yang terdiri dari:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Pemerintah Kota Makassar sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Walikota yang memuat poin-poin dalam hal pengawasan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Khusus pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, diamanatkan bahwa bentuk atau format pelaporan serta tata cara penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Gejala tersebut terdapat dalam kriteria yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁸⁹

Salah satu kriteria gangguan tersebut memungkinkan Pelaksana Pengawasan bertindak, tidak berdasarkan ketentuan dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Jika tidak ada peraturan walikota yang mengatur hal

⁸⁹ Soerjono Soekanto *Op.cit.*, hal.17-18

tersebut, SKPD terkait bisa saja menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi, karena belum ada aturan yang mengatur, serta beralih untuk tidak menindak lanjuti kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan realisasi penjualannya kepada pemerintah melalui Walikota yang menunjuk Kepala Dinas Perdagangan. Menurut pendapat penulis, pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar masih belum diterapkan karena dalam teknis pengawasannya Dinas Perdagangan tidak memiliki dasar Peraturan Walikota dan Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan penjualan di Kota Makassar. Hal-hal tersebutlah yang mengganggu jalannya penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana pengawasan agar kegiatan-kegiatan yang pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Menurut Soerjono Soekanto sarana dan fasilitas

yang dimaksud antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan yang dimana bidang ini telah melaksanakan pengawasan sebelum dibentuknya bidang khusus tentang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian, beliau mengatakan⁹¹

“SOP nya itu kita pakai peraturan menteri dan peraturan direktur jenderal Perdagangan dalam negeri yang membahas tentang Juknis dalam hal pelaksanaan pengendalian peredaran, termasuk pengawasannya”

Berdasarkan uraian soerjono soekanto dan diselaraskan dengan argumentasi tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa didalam pengawasan minuman beralkohol, SDM yang terlibat dalam pelaksana pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan dasar pelaksanaan pengawasan yang seharusnya sebagai pelaksana pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. SOP atau Standar Operasional Prosedur Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tidak dibentuk melalui Peraturan Menteri, SOP dibentuk

⁹⁰ *Ibid.* hal. 37

⁹¹ Hasil Wawancara pada tanggal 21 Maret 2017

berdasarkan kebijakan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

- (4) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.
- (6) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.⁹²

Sebelum dibentuk bidang khusus pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian yang saat ini SOP pengawasannya sedang dalam tahap penyusunan, dimana bidang tersebut belum bisa melakukan pengawasan atau dalam pelaksanaan pengawasannya masih berdasarkan SOP yang lama yang selama ini dipakai oleh Bidang Perdagangan dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

⁹² Lihat Pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Selain itu, berdasarkan kutipan wawancara penulis kepada Kepala Pelaksana Tugas Seksi Perdagangan juga mengemukakan:⁹³

“Pelaku usaha melaporkannya bukan kepada kami, tapi kepada dinas perdagangan tingkat provinsi, dari provinsi nanti mereka yang kirim hasil datanya ke dinas perdagangan kota, kalau untuk waktu penjualannya itu ikut dengan waktu-waktu tempat hiburan malam.”

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh salah satu tenaga manusia di Dinas Perdagangan yang melakukan pengawasan berdasarkan Tupoksi di bagian perdagangan sebelum adanya keputusan walikota yang menunjuk tim terpadu pengawasan, tidak memadai untuk melakukan pengawasan khususnya pada peredaran dan penjualan minuman beralkohol, karena sesuai yang beliau kemukakan di awal bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dan untuk pelaporan pelaku usaha melaporkan kegiatannya pada dinas perdagangan provinsi, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2014, menyebutkan:

“Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.”⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara tanggal 13 Maret 2017

⁹⁴ Lihat Pada Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar tidak berjalan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pendukung untuk membuktikan adanya pelaksanaan pengawasan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.
2. Berdasarkan analisis penulis faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak berjalan adalah:
 - a. Faktor hukum (undang-undang), merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol karena belum dikeluarkannya Peraturan Walikota dan belum adanya Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan karena masih berada dalam tahap penyusunan pasca terbitnya SK Walikota Makassar tentang Pembentukan Panitia Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman

Beralkohol Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut juga terjadi sebelum adanya SK Walikota, dimana Standar Operasional Prosedur yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah Peraturan Menteri Perdagangan, seperti yang penulis jabarkan pada Bab Hasil Penelitian, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pejabat pemerintahan diwajibkan untuk membentuk SOP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.⁹⁵

- b. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol, dikarenakan SDM yang terlibat dalam pelaksana pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan dasar pelaksanaan pengawasan yang seharusnya untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

⁹⁵ Lihat Pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pengawasannya segera ditetapkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang bentuk dan format pelaporan serta tata cara penjatuhan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksana pengawasan dapat bertindak berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu pula segera dibentuk Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan teknis pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.
2. Diperlukannya pendidikan khusus yang meliputi pendidikan singkat tentang pemahaman Peraturan Perundang-undangan kepada para pelaksana pengawasan agar dapat memahami tugas, fungsi, dan dasar-dasar peraturan untuk melaksanakan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Beni Ahmad Saebani. 2012. *Antropologi Hukum*. CV.Pustaka Setia: Bandung
- Inu Kencana Syafii. 2015. *Sistem Administrasi Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Makhfudz. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Mudjiono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Liberty Yogyakarta: Yogyakarta
- Said Sampara, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum edisi Revisi*. Kretakupa Print; Makassar
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press: Malang, Jawa Timur
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi pertama. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Negara*. cetakan kedua. PT.Rineka Cipta: Jakarta
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta

SUMBER HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

SUMBER LAINNYA

<http://fajar.co.id/2016/12/25/mabuk-miras-baku-hantam-hingga-bersimbah-darah/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017 jam 11.39

<http://antimiras.com/peraturan/ruu-anti-miras/> diakses pada tanggal 4 Februari 2017 jam 20.36

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11> diakses pada tanggal 6 Februari 2017 jam 10.59

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.37

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.58

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksana> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.39

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 jam 20.33

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 13 Februari 2017 jam 22.35